

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR  
DI KOTA PANGKALPINANG**

Sidiq Hanafiah

NPP. 29.0476

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [sidiqhanafiah4@gmail.com](mailto:sidiqhanafiah4@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The Province of the Bangka Belitung Islands is an area that is prone to various disasters, one of which is the flood disaster in Pangkalpinang City. On February 8, 2016 it has become the center of attention for the national topic of flood disaster which was reported by the online media news.detik.com and the official website bnpb.go.id where the affected areas include Taman Sari District, Rangkui District, and Bukit Intan District. which is up to 200 cm high. The author focuses on the performance of BPBD employees in tackling flood disasters in Pangkalpinang City. **Purpose:** This study aims to identify and analyze the performance, obstacles and efforts of BPBD in improving its performance in tackling flood disasters in Pangkalpinang City. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach with data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the performance of the Regional Disaster Management Agency in Overcoming Flood Disasters in Pangkalpinang City is maximal and according to procedures and rules or policies, this can be seen through several dimensions that measure performance, namely Individual Factors, Leadership Factors, Factors Team, and Situation Factors, but the System Factor is still not optimal because the facilities and infrastructure are inadequate due to the amount of damage. The inhibiting factors on the performance of the Regional Disaster Management Agency, namely the limited budget provision, the lack of public awareness of the potential for flood disasters, and the lack of human resources owned by the Regional Disaster Management Agency. There are several efforts to improve the performance of the Regional Disaster Management Agency in tackling flood disasters, namely increasing the quality of the performance of the Flood Disaster Management Agency, increasing the number of volunteer capacities, reducing disaster risk by carrying out rehabilitation and reconstruction in

dams/kolong jelana/bilun, increasing community participation in implementation, increasing community participation in the implementation of disaster management such as the establishment of a Disaster Resilient Village, and improving emergency response services to the community. **Conclusion:** The performance of BPBD Pangkalpinang City has been maximized, although with some existing obstacles. Disaster management is the obligation of all parties and there is a need for collective awareness in its implementation so that the impact can be minimized. Therefore, in addition to improving the performance of BPBDs, it is also necessary to increase awareness and active participation of the community in order to minimize the impact of disasters that can occur.

**Keywords:** Performance, BPBD, Flood

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang rawan akan berbagai bencana, salah satunya bencana banjir yang ada di Kota Pangkalpinang. Pada tanggal 08 februari 2016 telah menjadi pusat perhatian topik nasional tentang bencana banjir yang dilansir oleh media online news.detik.com dan website resmi bnpb.go.id yang dimana wilayah terkena dampak antara lain Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Bukit intan yang tingginya mencapai 200 centimeter. Penulis berfokus pada kinerja pegawai BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pangkalpinang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kinerja, hambatan serta upaya BPBD dalam meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pangkalpinang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang sudah maksimal dan sesuai prosedut serta aturan atau kebijakan, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang mengukur kinerja, yakni Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Tim, dan Faktor Situasi, akan tetapi Faktor Sistem masih belum maksimal karena sarana dan prasarana kurang memadai disebabkan banyaknya kerusakan. Adapun faktor penghambat pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu penyediaan anggaran yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana banjir, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana



banjir, yakni meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir, meningkatkan jumlah kapasitas relawan, mengurangi risiko bencana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di embung/kolong jelana/bilun, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan meningkatkan pelayanan tanggap darurat terhadap masyarakat. **Kesimpulan:** Kinerja BPBD Kota Pangkalpinang sudah maksimal, walaupun dengan beberapa hambatan yang ada. Penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak dan perlu adanya kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya sehingga dampak yang terjadi dapat lebih diminimalisir. Oleh sebab itu, selain peningkatan kinerja BPBD perlu juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi.

**Kata Kunci:** Kinerja, BPBD, Banjir

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang rawan akan berbagai bencana, salah satunya bencana banjir yang ada di Kota Pangkalpinang. Prosedur kerusakan banjir yang telah diuraikan secara singkat, pengaruh dari bencana banjir yang menyeret Kota Pangkalpinang bisa membawa pengaruh atau dampak terhadap kondisi fisik, kondisi psikososial, dan kondisi ekonomi.

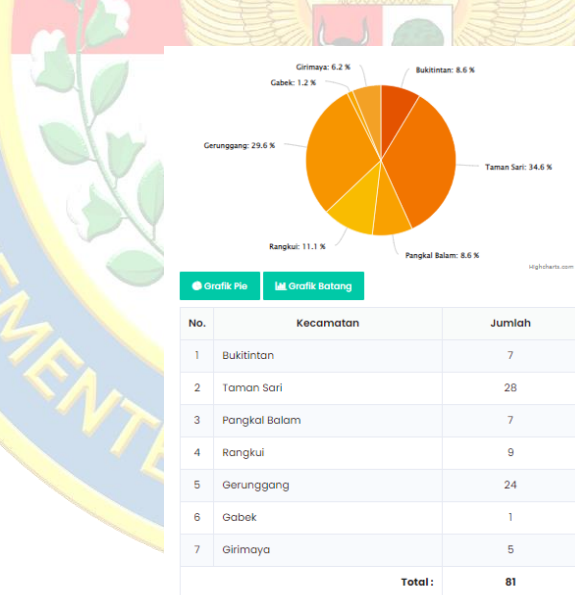
Kota Pangkalpinang pada tanggal 08 Februari 2016 telah menjadi pusat perhatian topik Nasional di Indonesia tentang insiden bencana banjir, yang dilansir oleh media online news.detik.com dan website resmi bnpb.go.id. Wilayah yang terkena dampak antara lain Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Bukit Intan yang tingginya mencapai 200 centimeter. Berdasarkan data awal yang saya dapat dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang tanggal 28 Agustus 2021, ada tiga kecamatan Kota Pangkalpinang yang terkena dampak bencana banjir sehingga memakan korban sejumlah 14.729 jiwa. Kerugian besar yang didapatkan Kota Pangkalpinang dalam bencana banjir tahun 2016. Kerugian tersebut yakni dari segi materi, non materi, maupun budaya sosialnya, sehingga penanganan masalah atau persoalan ini harus dan wajib dilakukan dengan serius. Sebab bencana banjir ini bisa menghambat proses jalurnya pembangunan seraya yang sudah direncanakan dan disusun oleh pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pangkalpinang merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi agar dapat mampu berperan dan bertindak aktif yang

menjadikan masyarakat yang daerahnya rawan bencana dapat menyadari dan memahami pentingnya penanggulangan bencana banjir, hingga bisa meminimalisir dampak pada bencana banjir yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, memberi perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Bencana banjir dapat ditangani dengan baik dan cepat, hal tersebut sangat membutuhkan kinerja yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Banjir peristiwa alam yang nyaris dapat diperhitungkan kejadian saat musim hujan datang. Banjir juga suatu peristiwa setiap tahun yang mendarah daging insidennya di Negara kita serta beberapa tempat, dan berbagai di kota besar. Sewaktu-waktu diusulkannya pengendalian terhadap permasalahan banjir, walaupun dalam tingkat operasional guna dalam menaggulangi serta meminimalisir banjir baik dari persebarannya atau volume tidak bisa berjalan sesuai perhitungan. Adapun data statistik pie bencana berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang sebagai berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Berdasarkan data dari BNPB, fluktuasi frekuensi bencana banjir di Kota Pangkalpinang dengan bentuk kerugian berupa korban jiwa dan terendamnya kawasan permukiman yang besarnya bergantung kepada intensitas banjir. Bencana banjir pada Tahun 2013, 2016 dan 2018 telah menimbulkan angka ungsian penduduk

yang besar dalam jumlah ribuan, dan tingkat ungsian terbesar pada Tahun 2016 mencapai 3.454 jiwa, dengan kerusakan rumah mencapai puluhan unit. Data terbaru bencana banjir Kota Pangkalpinang pada Tahun 2019 memiliki frekuensi kejadian banjir yang tinggi dengan tingkat ungsian mencapai 547 jiwa, dan sebanyak 72 rumah terendam. Banjir di Kota Pangkalpinang setiap tahun terjadi terutama di Kelurahan Bukit Intan dan Jalan Balai. Adapun rekapitulasi data bencana banjir 2019 yang ada di Kota Pangkalpinang:

NO	BULAN	PENYEBAB BENCANA						KORBAN TERDAMPAK	
		BJR&GAR	PT	LGSR	KBKR	GAR&B	PTB	Penderita	
1	Januari	0	1	0	0	0	4	4	0
2	Februari	9	1	0	0	5	0	0	0
3	Maret	4	0	0	0	2	0	0	6
4	April	7	0	0	0	8	0	0	0
5	Mei	11	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	7	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	34	0	0	0	0
9	September	0	0	0	24	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	9	0	0	0	0
11	November	0	0	0	6	7	1	0	0
12	Desember	6	0	0	0	15	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Berdasarkan dari tabel rekapitulasi data bencana banjir tahun 2019 Kota Pangkalpinang tersebut menunjukkan telah terjadi banyak sekali bencana banjir yang ada di Kota Pangkalpinang. Tingginya potensi bencana banjir di Kota Pangkalpinang merupakan sebuah tantangan kedepannya apabila melihat potensi perkembangan pembangunan yang ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu adanya untuk meningkatkan penanggulangan bencana yang lebih optimal.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks manajemen kebencanaan maupun konteks lembaga kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian yang ditulis oleh Nur Khotima Suri pada tahun 2015 di Kabupaten Karo dengan judul “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.”



Menyimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Karo nampak belum baik kinerjanya terhadap usaha menanggulangi bencana meletusnya gunung sinabung di Kabupaten Karo, hal tersebut dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan. Walaupun demikian peta rawan bencana sudah dimiliki BPBD Kabupaten Karo yang bisa membantu kinerja dan mengatasi bencana erupsi gunung sinabung (Nur Khotima Suri, 2015). Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Langkat Tahun 2017” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Andre Elfroza. Dalam penelitiannya Andre Elfroza menarik kesimpulan bahwa Kinerja BPBD Kabupaten Langkat dari hasil penelitian ini, sudah cukup baik dalam penanggulangan bencana, tetapi tidak semua indikator yang digunakan terpenuhi untuk menilai. BPBD Kabupaten Langkat juga memiliki beberapa kendala dalam menanggulangi bencana alam, namun BPBD Kabupaten Langkat juga berupaya mengatasi kendala tersebut agar kinerja tersebut tidak terhambat atau terganggu (Andre Elfroza, 2018). Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir” yang ditulis oleh Syahripul Yani pada tahun 2018, menyimpulkan Kinerja pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hilir belum dilakukan dengan baik dalam menangani kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Kurangnya keterampilan petugas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pencatatan hasil penelitian kinerja, dapat mempengaruhi aspek terwujudnya kinerja pegawai (Syahripul Yani, 2018).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitiannya yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teori yang bisa dilihat melalui beberapa dimensi yang mengukur kinerjanya yakni mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2016:84). Penulis memutuskan untuk menggunakan pengukuran kinerja yang dikemukakan Armstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2016:84), karena dianggap sesuai, dapat mewakili, dan lebih tepat dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pangkalpinang baik dari dalam maupun luar organisasi. Variabel yang digunakan yakni berbeda dengan variabel pada penelitian terdahulu, selain itu perbedaan juga terletak pada konsep, lokasi, fokus penelitian, dan ruang lingkup.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif yang dimana berawal dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian aktual. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor individu/pribadi, Kepemimpinan, Tim, Sistem, dan Situasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di deskripsikan melalui beberapa indikator guna melihat kinerjanya dalam menanggulangi bencana banjir. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purpose sampling*, dimana sampel data yang diambil dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, sehingga bisa mempermudah peneliti dalam menelusuri kondisi sosial atau objek yang diteliti. Penulis menentukan informan terhadap pengumpulan data dan kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana banjir berdasarkan teknik *purposive sampling*, yakni: Informan Kunci Kepala Pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang; Informan Utama, Sekretaris BPBD Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang Rekonstruksi Rahabilitasi dan Logistik BPBD Kota Pangkalpinang, dan Pegawai BPBD Kota Pangkalpinang; dan Informasi Tambahan, Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin (2012:69-70), yakni: Pengumpulan Data, yang didapatkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi; Reduksi Data, proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap tahapan penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi; Penyajian Data, dilakukan agar penulis dapat mempermudah dalam melihat hasil; dan Pengambilan Keputusan, proses tahapan terakhir dalam menganalisis data. Proses tersebut, memahami, dan mencari makna keteraturan pola, kejelasan, alur sebab akibat, serta proposisi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang

Kinerja adalah sebuah hasil kerja atau pencapaian pada kegiatan atau program yang sebelumnya sudah direncanakan untuk pencapaian yang telah ditetapkan tujuan dan targetnya oleh organisasi yang dilakukan pada waktu tertentu, yang dalam hal ini peneliti mengambil objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pangkalpinang sudah maksimal dan sudah



sesuai prosedur serta aturan atau kebijakan yang ada. Hal tersebut bisa dilihat melalui beberapa dimensi yang mengukur kinerjanya yakni;

#### A. *Personal Factors* (Faktor Pribadi)

Sumberdaya manusia Sumberdaya manusia bisa dikatakan memiliki peran sentral dalam kehidupan organisasi mengingat mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi. Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan berkomitmen, keterampilan dalam bekerja, tingkat motivasi serta kompetensi yang dikuasai. Semua indikator individu atau pribadi pada akhirnya ikut berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah memberikan komitmen dengan sikap yang baik kepada masyarakat serta memiliki keterampilan yang cukup baik, sehingga masyarakat merasa tetap selalu diperhatikan oleh para petugas atau anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi dalam meningkatkan keterampilan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Kegiatan ini juga bukan hanya meningkatkan keterampilan pegawai, melainkan meningkatkan komitmen serta motivasi pegawai

#### B. *Leadership Factors* (Faktor Kepemimpinan)

Faktor Kepemimpinan, tidak jarang ditemukan seorang pegawai yang memiliki kompetensi tinggi tetapi kinerjanya buruk. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua orang pegawai boleh jadi pada sebagian besar pegawai. Hal tersebut disebabkan yakni kualitas kepemimpinan seseorang di instansi tersebut kurang baik. Misalnya tidak mampu berinteraksi dengan pegawai dan gagal memberi dorongan, motivasi, inspirasi dan dukungan kepada pegawai, sehingga pegawai tidak bisa bekerja secara maksimal dan organisasi tidak mampu menghasilkan kinerja yang diinginkan.

Penulis menganalisis bahwasanya faktor kepemimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sudah baik. Observasi yang ada dilapangan, bahwasannya setiap pelaksanaan apel pagi maupun sore Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang selalu memberikan dorongan, dukungan, serta motivasi kepada bawahan atau pegawai yang ada. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang agar menjadi lebih maksimal.

#### C. *Team Factors* (Faktor Tim)

Kehidupan organisasi, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan seorang pegawai secara mandiri. Keterlibatan rekan kerja tidak bisa dihindarkan. Artinya kinerja



individu pegawai dan kinerja organisasi secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas seseorang dalam menyelesaikan tugas tetapi juga dukungan rekan kerja menjadi sangat penting karena dapat menentukan kinerja organisasi.

Penulis dapat menyimpulkan dari wawancara yang telah dilakukan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang terhadap faktor Tim sudah maksimal. Hal tersebut dilihat dari koordinasi antar instansi yang lain serta dukungan dan setiap tahapan bencana yang dilakukan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Biasanya juga didukung oleh rapat koordinasi.

Hasil observasi penulis yang ada dilapangan hubungan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi atau dinas terkait selama ini baik. Selama ini kerjasama terjalin baik antara dinas di Kota Pangkalpinang. Dalam mengevakuasi korban serta memberikan bantuan maka dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat terbantu dengan adanya kerjasama yang baik ini antara kerjasama dinas terkait dan kerjasama antar pegawai yang telah membantu dalam penanganan bencana banjir.

#### D. *System Factors* (Faktor Sistem)

Sistem terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling berkaitan. Artinya gagalnya salah satu sub-sistem bisa menggagalkan performa organisasi atau instansi secara keseluruhan. Seperti sarana/prasarana dan sistem kerja di instansi, Hal tersebut berarti organisasi atau instansi harus menjaga dan memonitor sistem organisasi agar dapat berjalan lancar sehingga mampu berkinerja dengan baik.

Berdasarkan data sarana dan prasarana diatas, sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah banyak mengalami kerusakan, seperti kerusakan ringan terdapat 18 peralatan dan kerusakan berat terdapat 45 peralatan. Melihat jumlah sarana dan prasarana dengan rusak berat yang peneliti rasa cukup banyak, hal ini menyebabkan terganggunya serta hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, walaupun mekanisme sistem kerjanya sudah baik dan sesuai SOP. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya sarana dan prasarana yang rusak, sehingga dalam mendukung kegiatan atau program di setiap tahapan bencana dalam menanggulangi bencana banjir terhambat.

#### E. *Contextual/situational Factors* (Faktor Situasi)

Setiap kinerja pasti memiliki tekanan, faktor internal maupun eksternal, tinggal bagaimana penyelesaiannya. Sama halnya dengan instansi yang menangani bencana banjir yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang. Hal tersebut sering dijumpai dengan persoalan berupa, tekanan pimpinan terhadap pegawai, anggaran yang terbatas, serta kepedulian masyarakat terhadap bencana banjir.

Bahwasannya *Contextual/situational Factors* (faktor situasi) hal yang paling kompleks dialami dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yakni, permasalahan anggaran yang terbatas serta kepedulian masyarakat terhadap bencana masih kurang, tetapi tekanan pimpinan kepada pegawai sudah baik, karena dapat menyelesaikan tugas untuk menuju arah yang harus dicapai agar dalam menyelesaikan perkerjanya sesuai dengan waktu yang seharusnya. Kemudian, penanganan dalam masalah anggaran dan kepedulian masyarakat belum maksimal.

### **3.2. Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang**

Terkait pelaksanaan dalam menanggulangi bencana banjir, tentunya tidak akan terlepas dari adanya hambatan walupun sudah melaksanakan persiapan sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang terbilang muda karena baru berdiri pada tahun 2016. Sehingga masih banyak kekurangan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, dan dapat menimbulkan beberapa hambatan dalam menanggulangi bencana banjir. Beberapa hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir, antara lain yakni:

#### **A. Penyediaan Anggaran yang Terbatas**

Kurangnya anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan sangat terasa pada bagian peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta persediaan peralatan dan logistik. Karena hal tersebut dalam menanggulangi bencana sarana dan prasarana haruslah lengkap dan memadai. Sebelum terjadinya bencana tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kegiatan semacam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk persiapan penanggulangan bencana. Hal tersebut dikarenakan, penanganan kebencanaan harus mempunyai ilmu maupun keterampilan yang diikuti oleh personal Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang semestinya membutuhkan anggaran yang cukup untuk kegiatan tersebut, akan tetapi anggaran yang sudah di tentukan tidak pernah mencukupi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021 mendapatka anggaran Rp. 3,7 Miliar, di antaranya Rp. 3,4 Miliar untuk gaji pegawai, honorer, dan sisanya untuk operasional dan perlengkapan kantor. Nilai anggaran ini belum seimbang antara anggaran dan sumber daya manusia yang sudah terlalu melebihi batas. Idealnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun terdapat delapan kali pelatihan kemudian dua kali simulasi, serta memiliki peralatan dan perlengkapan



dasar seperti tenda, perahu karet dan pelampung. Hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

#### B. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Potensi Bencana di Lingkungan Tempat Tinggalnya

Bencana yang paling sering melanda wilayah Kota Pangkalpinang merupakan bencana banjir. Sayangnya, kondisi tersebut tidak dibarengi perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Potensi bencana banjir yang sering terjadi, masyarakat perlu terus didorong untuk berperilaku adaptif dalam mengantisipasi risiko bencana banjir.

Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap risiko bencana, seperti tinggal di bantaran sungai yang rawan banjir. Peningkatan masyarakat diperlukan upaya aktif dari pemerintah pusat dan daerah secara konsisten dan tegas untuk mengintervensi perilaku masyarakat agar siaga terhadap bencana. Kemudian, masyarakat banyak yang tidak peduli dan membuang sampah di sekitar sungai.

Hasil dari observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan bahwa belum ada terbentuk masyarakat yang peduli terhadap banjir baik itu masyarakat disekitar sungai ataupun masyarakat yang tinggal jauh dari sungai, buktinya masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan kesungai, hal itu dapat menyebabkan air sungai akan cepat melimpah dan banjir akan cepat terjadi. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah semestinya tidak hanya fokus mencari penyebab bencana, namun juga perlu mencari solusi. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya mensosialisasikan kesadaran bencana di masyarakat. Tidak hanya melalui berbagai kegiatan formal, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui forum-forum informal.

#### C. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Penanggulangan bencana dalam skala kecil tentunya tidak akan menyebabkan permasalahan karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dengan jumlah personil yang tersedia masih dapat *meh-handlenya*, namun apabila bencana yang terjadi sudah masuk kedalam skala besar dan penanganannya kompleks, sehingga dalam penanggulangannya membutuhkan lebih banyak personil.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercatat saat ini memiliki total 80 personil dengan rincian 21 Pegawai Negeri Sipil dan 59 sebagai tenaga honorer. Dalam hal jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang jumlahnya tidak sebanding dengan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terutama pada saat situasi darurat. Kendalanya



ada pada *assessment* kepegawaian atau meninjau lokasi secara langsung baik pada lokasi banjir atau bencana lainnya.

Saat terjadi bencana dengan kurangnya personil dalam bertugas maka dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan yang tidak tepat waktu. Baik laporan masalah keuangan, kebencanaan, maupun kepegawaian. Namun apa yang diminta untuk laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sesuai dengan permintaan. Berhubung kurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat memperlambat pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing.

### **3.3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Meningkatkan Kinerjanya dalam Rangka Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang**

#### **A. Meningkatkan Kualitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang**

Peningkatan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mengikuti beberapa diklat dan pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan instansi terkait seperti TNI/POLRI dan instansi lainnya yang mungkin berbeda dalam meningkatkan kualitas kerja. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana, akan tetapi masyarakat juga terlibat dalam urusan penanggulangan bencana. Rapat dinas dan apel pagi juga menjadi ajang untuk membahas hasil dari pencapaian kegiatan evaluasi. Peningkatan diri terhadap kualitas kinerja terhadap bencana bisa dilakukan jika ada waktu luang, hal tersebut agar tidak kaget dalam menghadapi.

#### **B. Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Relawan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan re-organisasi setiap tahun untuk pembentukan organisasi relawan serta mengadakan pertemuan, melakukan bintek-bintek sehingga terus menanamkan jiwa sosial terhadap masyarakat khususnya yang peduli terhadap bencana dan setelah itu ditindak lanjuti dengan adanya masukan-masukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk organisasi Desa Tangguh Bencana, seraya meningkatkan kapasitas relawan, serta meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat yang di daerahnya rawan bencana banjir. Relawan tersebut diberi pelatihan khusus agar bisa mandiri serta bisa menangani bencana seperti diberikannya pertolongan pertama. Relawan tersebut juga diberi pengetahuan jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah turun ke tempat kejadian waktunya tidak cukup apalagi bencana yang susah di jangkau. Setiap tahun terdapat bintek sar kepada masyarakat Kota Pangkalpinang agar bisa membantu dalam menanggulangi bencana di Kota Pangkalpinang.

C. Mengurangi Risiko Bencana di Kota Pangkalpinang, dengan Melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Embung/Kolong Jelana/Bilun

Beberapa usaha dapat dilakukan untuk mengurangi potensi bencana. Embung/kolong jelana/bilun merupakan sebuah tempat penampungan dan resapan air yang terletak di dua kelurahan yakni Parit Lalang dan Asam. Pada saat terjadinya bencana banjir besar yang melanda Kota Pangkalpinang pada tahun 2016, lokasi Embung/kolong tersebut tak terlepas dari luapan air/banjir yang mengakibatkan terdampaknya lingkungan dan rumah-rumah di wilayah tersebut dikarenakan tidak maksimalnya pemanfaatan Embung/kolong tersebut. Pasca banjir 2016 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang melalui bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan logistik melakukan perbaikan infrastruktur dengan cara menormalisasi serta pengerukan dan pembuatan talud di Embung/kolong tersebut guna meminimalisir terjadinya banjir dan memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada di Kota Pangkalpinang, adapun anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang sebesar 8,6 Miliar Rupiah.



Pada saat ini, Embung/Kolong Jelana/Bilun tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pangkalpinang. Embung/kolong Jelana/bilun diharapkan dapat bermanfaat diantaranya: Sebagai tempat penampungan air hujan/resapan air guna meminimalisir banjir; Sebagai cadangan air baku bagi kebutuhan masyarakat; Sebagai destinasi wisata air baru di wilayah tersebut; Mengurangi wilayah kumuh agar penataan ruang lebih baik.

D. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan upaya terhadap meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir. Desa tangguh bencana, yakni desa yang



berkemampuan mandiri, beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan cepat dari dampaknya bencana yang merugi (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012). Selama proses kegiatan berlangsung, program ini membutuhkan fasilitator yang dimana sebagai pendamping di masyarakat dalam penyelenggaraannya.

E. Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan piket 24 jam yang dimana selalu on call/quick respon non stop jika terdapat laporan dari masyarakat. Petugas yang melaksanakan piket tersebut, langsung menuju tindakan awal ke lokasi, kemudian kebutuhan apa yang akan diperlukan nantinya agar bisa dipersiapkan. Apabila terdapat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tanggap dan segera menuju lokasi lalu mengecek jikalau dibutuhkan personil dan logistik yang banyak, hal tersebut akan segera di berikan dan harus selalu siap ketika ada berita terhadap bencana.

F. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana

Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi terhadap penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelumnya melakukan identifikasi lokasi, maka akan di usulkan anggaran rehabilitasinya. Apabila, kerusakan masih parah dan jumlah APBD banyak yang dibutuhkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang membuat laporan lalu akan di laporkan ke Wali Kota, kemudian nanti di nota dinaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi sangat besar berkaitan dengan anggaran jika kalau ingin meningkatkan pelayanan apabila terdapat banyak kejadian bencana yang harus dikerjakan, sementara itu anggaran yang diturunkan tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan semua kejadian bencana tidak dapat dikerjakan.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pangkalpinang memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat terhadap potensi bencana dan penanggulangan terhadap suatu bencana. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan BPBD terkait penanggulangan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang didalamnya juga terdapat bentuk preventif dalam paradigma baru penanggulangan bencana nasional.



Penulis menemukan temuan penting yaitu penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara sehingga perlu juga partisipasi aktif masyarakat yang terlibat serta diperlukanya koordinasi mengingat koordinasi atau komunikasi merupakan unjung tombak dalam penanggulangan bencana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang sudah maksimal dan sesuai prosedur serta aturan atau kebijakan, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang mengukur kinerja, yakni Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Tim, dan Faktor Situasi, akan tetapi Faktor Sistem masih belum maksimal karena sarana dan prasarana kurang memadai disebabkan banyaknya kerusakan. Adapun faktor penghambat pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu penyediaan anggaran yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana banjir, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hambatan-hambatan BPBD Kota Pangkalpinang dalam penanggulangan bencana yakni, penyediaan anggaran yang terbatas. Nilai anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang belum seimbang antara anggaran dan sumber daya manusia, sehingga pelatihan dan program serta sarana dan prasarana terhambat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana juga merupakan salah satu hambatan yang dimiliki Badan Penangglangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah ke sungai serta banyaknya masyarakat tinggal di bantaran sungai yang rawan akan banjir. Kemudian, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang. Bencana banjir dengan skala besar ataupun terjadi dalam waktu yang berdekatan serta kompleks menjadi permasalahan karena membutuhkan lebih banyak personil. jumlahnya tidak sebanding dengan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir terutama dalam situasi darurat.

Meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir terdapat upaya yang dapat dilakukan yakni, Meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dengan mengikuti diklat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan pelatihan gabungan bersama instansi terkait seperti TNI/POLRI dalam rangka peningkatan kualitas kerja. Rapat dinas dan apel pagi/sore juga dapat menjadi wadah dalam

membahas pencapaian kegiatan. Meningkatkan jumlah kapasitas relawan, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk organisasi Desa Tangguh Bencana, dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang terutama di daerah rawan bencana agar sadar. Mengurangi risiko bencana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Embung/Kolong Jelana/Bilun. Perbaiki infrastruktur dengan cara menormalisasi serta pengerukan dan pembuatan talud di Embung/kolong tersebut guna meminimalisir terjadinya banjir dan memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada di Kota Pangkalpinang. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembentukan Desa Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar desa memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana. Meningkatkan pelayanan tanggap darurat terhadap masyarakat dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan piket 24 jam dan selalu on call/quick respon non stop jika ada laporan dari masyarakat mengenai adanya ancaman bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang selalu tanggap jikalau butuh logistik dan personil yang banyak. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dimana seksi ini mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Pangkalpinang sudah maksimal dan sesuai prosedur serta aturan atau kebijakan, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang mengukur kinerja, yakni Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Tim, dan Faktor Situasi, akan tetapi Faktor Sistem masih belum maksimal karena sarana dan prasarana kurang memadai disebabkan banyaknya kerusakan. Adapun faktor penghambat pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu penyediaan anggaran yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana banjir, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir, yakni meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir, meningkatkan jumlah kapasitas relawan, mengurangi risiko bencana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di embung/kolong jelana/bilun, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan meningkatkan pelayanan tanggap darurat terhadap masyarakat.



**Keterbatas Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa kecamatan di Kota Pangkalpinang sehingga belum menyeluruh.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam penanggulangan bencana tanah longsor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Efroza Andre. 2016. "Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Langkat." *Manajemen Sumber Daya Manusia* 2008(Apr-2016):19
- Suri, Nur Khotimah. 2015. "Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya." 456–77.
- YANI, SYAHRIPUL. 2017. "Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir."